



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH DAERAH D.I. YOGYAKARTA
UNIT KERJA : DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK

I. DATA PRIBADI

- Nama : TISNA SARI ATMIKAWATI
- Jabatan : SEKRETARIS
- NHK : 456515

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.331.250.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/192 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 650.050.000
- Tanah Seluas 307 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 186.200.000
- Tanah Seluas 278 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
- Tanah dan Bangunan Seluas 116 m2/80 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 365.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 259.000.000

- MOBIL, HONDA HONDA BRV MANUAL E MT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
- MOTOR, HONDA VARIO 150 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
- MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 20.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 21.197.543

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.631.947.543

III. HUTANG Rp. 237.161.640

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.394.785.903



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.